

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Aset atau Barang milik wilayah (BMD) merupakan komponen penting dalam kerangka organisasi pemerintah dan pengabdian masyarakat. Milik Daerah (BMD) mewakili beberapa sumber daya paling penting yang dimiliki wilayah tersebut untuk memfasilitasi fungsi pemerintah daerah. Hal ini penting karena ketersediaan barang milik daerah memungkinkan pelaksanaan upaya pembangunan nasional yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas dan menguntungkan masyarakat daerah secara khusus. Oleh karena itu, sangat penting bahwa Barang Milik Daerah dikelola secara efektif dan benar, memastikan bahwa pengelolaannya dicirikan oleh transparansi, efisiensi, akuntabilitas, efektivitas biaya, dan jaminan nilai. Paradigma yang muncul untuk mengelola Barang Milik Daerah juga menyoroti pentingnya menghasilkan nilai tambah dari aset-aset yang dimiliki dan dikelola oleh daerah.

Salah satu sumber daya yang diawasi oleh Pemerintah Daerah terdiri dari aset tetap. Aset tetap mengacu pada sumber daya berwujud yang digunakan atau dimaksudkan untuk pemanfaatan dalam operasi pemerintah daerah atau untuk penggunaan umum, dengan masa pakai melebihi 12 bulan. Selain berfungsi sebagai 'modal kerja', aset tetap biasanya dimanfaatkan sebagai instrumen investasi jangka panjang untuk organisasi. Mengingat bahwa tujuan memperoleh aset tetap adalah untuk mendukung modal kerja daripada untuk dijual kembali, penting untuk

mempertimbangkan dengan tepat proses pengadaan dan metode akuisisi. Pilihan organisasi untuk membiayai investasi melalui manajemen aset sangat menarik, namun organisasi sering menghadapi tantangan dalam memperoleh item modal penting atau aset tetap dengan biaya serendah mungkin.

Pentingnya aset tetap dalam pemerintah daerah, oleh karena itu, membutuhkan pengelolaan aset yang efektif. Pengawasan aset tetap yang tepat sangat penting untuk stabilitas keuangan suatu wilayah, karena aset yang dimiliki berfungsi sebagai sarana untuk mengukur perkembangan kekayaan, terutama dalam mengevaluasi rasio likuiditas dan solvabilitas, mengingat bahwa perhitungan ini didasarkan pada aset. Dengan pemahaman bahwa rasio pemerintah daerah menguntungkan, semakin banyak orang luar akan mendapatkan kepercayaan terhadap kinerja pemerintah daerah.

Manajemen aset membentuk dasar bagi Pemerintah Daerah dalam mengawasi asetnya, yang mengarah pada peningkatan fungsionalitas aset itu sendiri, baik dalam kuantitas maupun nilai. Sejak diperkenalkannya peraturan mengenai pengelolaan Properti Daerah (BMD) dan berbagai kerangka peraturan lainnya, upaya telah diarahkan untuk membangun dasar dan wewenang yang kuat bagi pemerintah untuk mengelola aset daerah (Mona dan Mokodompit, 2017). Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa pelaporan yang dilakukan transparan dan akuntabel, terutama kepada seluruh masyarakat dan selaras dengan tujuan yang dimaksudkan. Salah satu pemerintah daerah yang terus berjuang dengan pengelolaan aset tetap adalah

Pemerintah Kabupaten Kupang. Tabel 1.1 di bawah ini menyajikan data Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Kupang untuk tahun 2021-2022.

Tabel 1.1
Data Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Kupang Tahun 2021-2022

No	Aset Tetap	2021 (Rp)	2022 (Rp)	Keterangan
1	Tanah	325.983.066.907,00	454.169.101.845,00	Naik Rp. 128.186.034.938,00
2	Peralatan dan Mesin	453.590.412.861,10	500.474.047.162,58	Naik Rp. 46.883.634.301,48
3	Gedung dan Bangunan	771.257.261.758,22	879.223.967.562,42	Naik 107.966.705.804,20
4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	1.081.025.948.274,78	1.221.547.262.267,94	Naik Rp. 140.521.313.993,16
5	Aset tetap Lainnya	51.954.759.451,00	51.069.569.475,00	Turun Rp. 885.189.976,00
6	Konstruksi dalam Pengerjaan	39.567.985.357,25	20.266.598.302,30	Turun Rp. 19.301.387.054,95
7	Akumulasi penyusutan	(1.068.976.410.171,55)	(1.339.511.017.061,20)	Turun Rp. 270.534.606.889,65
Jumlah		1.654.403.024.437,80	1.787.239.529.554,04	132.836.505.116,24

Sumber: LHK BPK, 2024

Neraca Pemerintah Kabupaten Kupang menyajikan saldo Aset Tetap per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing senilai Rp1.787.239.529.554,04 dan Rp1.654.403.024.437,80, atau mengalami kenaikan senilai Rp132.836.505.116,24.

Berdasarkan Laporan Hasil pemeriksaan BPK selama 5 (lima) tahun terakhir yaitu Tahun 2018-2022 (untuk Tahun 2023, masih dilakukan pemeriksaan oleh BPK RI, berikut dipaparkan beberapa catatan atau temuan mengenai permasalahan aset tetap di Pemerintah Kabupaten Kupang.

1. Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK yang dimuat dalam LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kupang Tahun 2022, yaitu LHP atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan diketahui terdapat temuan pemeriksaan terkait penatausahaan aset tetap pada Pemerintah Kabupaten Kupang yang belum tertib dan menjadi dasar opini wajar dengan pengecualian.
2. Tidak terdapat penomoran registrasi atas aset- aset/inventaris yang diperoleh di tahun 2020-2023 sehingga pada saat dilakukan cek fisik, sulit diketahui tahun berapa perolehan aset tetap/inventaris tersebut dan aset mana saja yang masih bisa produktif.
3. Aset Tetap yang sudah rusak berat (RB) dan tidak dipergunakan lagi belum dihapuskan dari daftar aset tetap.

Ada banyak faktor yang dapat mempengaruhi manajemen aset. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) yang berfungsi sebagai pedoman sistem pengendalian, dapat disimpulkan bahwa kualitas aparatur daerah, kepatuhan terhadap persyaratan peraturan, dan penggunaan teknologi informasi yang efektif berdampak signifikan terhadap pengelolaan aset untuk memberikan jaminan yang memadai dalam pelaporan dan perlindungan aset. Dalam hal komitmen kepemimpinan, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Properti Nasional/Daerah menunjukkan bahwa pengelolaan Barang Milik Nasional/Daerah yang semakin canggih dan rumit tidak

memiliki kerangka kerja yang komprehensif, sehingga memerlukan komitmen kepemimpinan yang kuat dan akuntabel.

Faktor awal adalah inventaris aset. Kehadiran aset dalam suatu entitas atau organisasi sangat penting karena memfasilitasi penjelasan semua operasi sehari-hari. Inventarisasi mengacu pada proses pencatatan dan penyusunan secara sistematis daftar sarana dan infrastruktur yang ada secara akurat sesuai dengan peraturan yang relevan. Melakukan inventarisasi aset sangat penting karena membantu dalam pemantauan mendasar dan persiapan laporan tentang aset yang ada di kantor. Selain itu, inventaris dapat berfungsi sebagai dasar untuk membuat keputusan mengenai penambahan aset untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan fasilitas dan infrastruktur kantor.

Terdapat 6 (enam) Permasalahan inventarisasi aset berikut pada Pemerintah Kabupaten Kupang.

1. Aset Tetap Tanah. Permasalahannya adalah terdapat 154 bidang tanah tercatat dengan nilai Rp0,00/Rp1,00 dan/atau belum sesuai harga perolehan serta luasan 0 m² ; terdapat 79 bidang tanah tidak diketahui keberadaannya; terdapat 583 bidang tanah belum bersertifikat; terdapat 187 bidang aset tanah berupa tanah di bawah jalan, tanah di bawah bangunan air/irigasi, dan tanah sekolah yang belum tercatat di KIB dan belum dilakukan penilaian; terdapat 8 (delapan) bidang tanah yang sama-sama dicatat oleh Pemerintah Kabupaten Kupang dan Kementerian PUPR Dirjen Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai NTT II/Pemerintah Provinsi

NTT/Pemerintah Kota Kupang; terdapat dua bidang tanah tercatat ganda; dan terdapat 15 bidang tanah yang dikuasai oleh pihak lain.

2. Aset Tetap Peralatan dan Mesin. Permasalahannya adalah terdapat 115 Aset Peralatan dan Mesin yang belum dapat diidentifikasi/diketahui keberadaannya dan sembilan kendaraan tidak terdapat STNK; terdapat 181 unit kendaraan senilai Rp4.104.489.192,00 dan 18 unit alat elektronik senilai Rp108.226.593,00 yang dikuasai oleh pensiunan dan pegawai mutasi; terdapat 51 peralatan dan mesin yang bernilai tidak wajar Rp0,00 s.d. Rp100,00; terdapat tujuh peralatan dan mesin dicatat secara gabungan; dan terdapat 35 BPKB yang berada di SKPD dan 677 BPKB pada delapan SKPD tidak ditemukan.
3. Aset Tetap Gedung dan Bangunan. Permasalahannya adalah terdapat 85 unit gedung dan bangunan pada 23 sekolah belum dicatat pada KIB; terdapat 68 sekolah (26 SD dan 42 SMP) belum melakukan pencatatan gedung dan bangunan sesuai dengan rincian; terdapat 111 kegiatan senilai Rp23.982.109.685,00 belum diatribusi ke aset induk; terdapat delapan gedung dan bangunan pada tiga SKPD yang bernilai tidak wajar Rp0,00 dan Rp1,00; dan terdapat 10 unit aset gedung dan bangunan yang tidak diketahui keberadaannya.
4. Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan (JIJ). Permasalahannya adalah terdapat 38 unit aset JIJ belum dapat diidentifikasi/ditelusuri keberadaannya; terdapat 213 pekerjaan jasa konsultasi, perencanaan/pengawasan, dan peningkatan ruas jalan belum dapat dikapitalisasikan; dan terdapat 246 unit JIJ yang bernilai Rp0,00 dan Rp1,00

5. Aset Tetap Lainnya. Permasalahannya adalah terdapat aset tetap lainnya yang tidak sesuai dengan klasifikasinya sebanyak 20 unit pada tiga SKPD senilai Rp2.664.073.349,00; terdapat aset tetap lainnya yang dicatat secara gabungan sebanyak 487 unit senilai Rp4.058.628.255,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; dan terdapat aset tetap lainnya yang memiliki nilai tidak wajar senilai Rp1,00 s.d. Rp35,00 sebanyak 3.839 unit pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
6. Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP). Permasalahannya adalah sebanyak 69 unit KDP senilai Rp35.291.030.113,00 pada tujuh SKPD belum jelas status penyelesaiannya.

Faktor kedua berkaitan dengan teknologi informasi. Keuntungan yang diberikan oleh teknologi informasi termasuk pemrosesan data atau transaksi yang cepat dan pembuatan laporan, kapasitas untuk menyimpan data yang luas, pengurangan kesalahan, dan penurunan biaya pemrosesan. Aplikasi perangkat lunak dan komputer akan membantu dalam pembuatan laporan keuangan dan aset, memastikan bahwa laporan dapat dibuat dengan lebih mudah, cepat, dan akurat, membuatnya dapat diakses kapan pun diperlukan.

Sesuai hasil pemeriksaan BPK, diketahui bahwa Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kupang dalam proses pengelolaan aset tetap belum sepenuhnya menggunakan aplikasi Sistem Manajemen Aset Daerah.

- 1) Kepala BPKAD dan Kepala SKPD terkait belum optimal dalam menindaklanjuti permasalahan Aset Tetap, permasalahan pencatatan informasi Kartu Inventaris Barang (KIB) dalam aplikasi BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur 68

SIMDA Barang Milik Daerah, rekonsiliasi aset yang belum dilakukan secara berkala dan tidak melakukan perhitungan dan pencatatan atas Beban/Akumulasi Penyusutan sesuai dengan Kebijakan Akuntansi

- 2) Bendahara Barang pada SKPD belum seluruhnya memahami pencatatan atas Aset Tetap sesuai dengan kondisi yang sebenarnya dan belum sepenuhnya memahami penggunaan aplikasi SIMDA Barang Milik Daerah dalam penatausahaan aset
- 3) Aplikasi SIMDA BMD belum andal dalam melakukan perhitungan beban dan akumulasi penyusutan aset tetap sesuai kebijakan akuntansi.

Elemen ketiga adalah dedikasi kepemimpinan. Sebagaimana dicatat oleh Yusuf dalam Yuliana (2021:217), diperlukan komitmen berkelanjutan dari kepemimpinan yang memotivasi manajer pengiriman untuk menyelaraskan pekerjaan mereka dengan misi dan tujuan yang dibayangkan. Simamora dan Halim (2012) menegaskan bahwa faktor-faktor penting dari komitmen kepemimpinan memiliki dampak signifikan pada manajemen aset. Dedikasi kepemimpinan sangat penting dalam organisasi pemerintah, karena pemimpin birokrasi yang menganut hukum akan menginspirasi bawahan mereka untuk terlibat dalam penegakan peraturan. Salah satu tantangan terkait manajemen BMD adalah bahwa Pemimpin Perangkat Regional cenderung beroperasi terutama sebagai pengguna anggaran, sehingga mengurangi tanggung jawab mereka sebagai manajer aset OPD. Dalam konteks ini, komitmen kepemimpinan, terutama dari Pemimpin Unit Daerah, memainkan peran penting dalam manajemen BMD dan diantisipasi untuk mengatasi masalah yang terkait dengannya.

Hal ini sejalan dengan perspektif Asep Joniheriyanto dalam Rosihan (2017:2), yang menyatakan bahwa komitmen yang kuat terhadap organisasi muncul ketika kepemimpinan secara efektif mendistribusikan kekuatannya dengan cara yang dianggap dapat diterima dan memotivasi, mendorong komitmen tinggi dari semua personel dalam organisasi. Pemimpin yang memahami kompleksitas dan keragaman kemampuan, sikap, dan perilaku personel mereka akan mahir menerapkan strategi untuk mempengaruhi bawahan mereka.

Masalah utama mengenai komitmen manajemen dalam manajemen aset tetap adalah dukungan yang tidak memadai dari kepemimpinan dalam mematuhi peraturan dan memanfaatkan teknologi informasi untuk manajemen aset; keterlibatan terbatas dalam proses pengambilan keputusan mengenai manajemen aset tetap; dan pengawasan dan evaluasi praktik manajemen aset tetap yang tidak memadai.

Lemahnya pengawasan pimpinan terhadap aset tetap antara lain adanya 15 bidang tanah yang dikuasai oleh pihak lain, terdapat 181 unit kendaraan senilai Rp4.104.489.192,00 dan 18 unit alat elektronik senilai Rp108.226.593,00 yang dikuasai oleh pensiunan dan pegawai mutasi, terdapat 38 unit aset Jaken, Irigasi dan jaringan (JIJ) belum dapat diidentifikasi/ditelusuri keberadaannya.

Selain permasalahan yang telah diuraikan, penelitian ini juga didasarkan pada adanya perbedaan hasil penelitian terdahulu. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Paramitha (2017) berjudul “Pengaruh Kepatuhan pada Regulasi, Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Komitmen Pimpinan Terhadap Pengelolaan Aset Tetap Pemerintah Provinsi Jawa Barat’ hasilnya adalah komitmen pimpinan berpengaruh

positif dan signifikan terhadap pengelolaan aset tetap Pemerintah Provinsi Jawa Barat”. Sedangkan menurut penelitian Mansyur (2018) berjudul “Pengaruh Pemanfaatan Teknologi dan komitmen pimpinan terhadap Pengelolaan Aset Tetap Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara’ diperoleh hasil yang menyatakan bahwa komitmen pimpinan tidak berpengaruh terhadap pengelolaan aset tetap Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Penelitian Aisah (2024) berjudul “Implementasi Teknologi Informasi dalam Pengelolaan Aset atau Barang Milik Daerah Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sampang” memperoleh hasil yang menyatakan teknologi informasi berpengaruh besar terhadap peningkatan transparansi dalam pengelolaan aset. Transparansi ini tercapai melalui mudahnya akses terhadap data aset yang relevan bagi pemangku kepentingan, termasuk auditor, regulator, dan masyarakat umum. Sedangkan Tuniar (2023) dengan judul penelitian “Analisis Pengaruh Pengawasan Internal dan Teknologi Informasi terhadap Pengelolaan Aset Daerah Pemerintah Kota Surakarta” hasilnya tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara teknologi informasi terhadap pengelolaan aset daerah pemerintah kota Surakarta.

Dari teori, penelitian terdahulu dan fenomena yang terjadi, peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul: **“Pengaruh Teknologi Informasi dan Komitmen Pimpinan terhadap Pengelolaan Aset Tetap pada Pemerintah Kabupaten Kupang dengan Inventarisasi Aset sebagai Variabel Mediasi”**.

1.2. Masalah Penelitian

Masalah penelitian ini dirumuskan sebagai berikut.

1. Bagaimana gambaran pengelolaan aset tetap, inventarisasi aset, teknologi informasi dan komitmen pimpinan pada Pemerintah Kabupaten Kupang?
2. Apakah teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan aset tetap Pemerintah Kabupaten Kupang?
3. Apakah komitmen pimpinan berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan aset tetap Pemerintah Kabupaten Kupang?
4. Apakah inventarisasi aset berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan aset tetap Pemerintah Kabupaten Kupang?
5. Apakah teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap inventarisasi aset Pemerintah Kabupaten Kupang?
6. Apakah komitmen pimpinan berpengaruh signifikan terhadap inventarisasi aset Pemerintah Kabupaten Kupang?
7. Apakah inventarisasi aset mampu memediasi pengaruh teknologi informasi dan komitmen pimpinan terhadap pengelolaan aset tetap Pemerintah Kabupaten Kupang?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah:

1. Untuk mengetahui gambaran pengelolaan aset tetap, inventarisasi aset, teknologi informasi dan komitmen pimpinan pada Pemerintah Kabupaten Kupang

2. Untuk mengetahui signifikansi pengaruh teknologi informasi terhadap pengelolaan aset tetap Pemerintah Kabupaten Kupang
3. Untuk mengetahui signifikansi pengaruh komitmen pimpinan terhadap pengelolaan aset tetap Pemerintah Kabupaten Kupang
4. Untuk mengetahui signifikansi pengaruh inventarisasi aset terhadap pengelolaan aset tetap Pemerintah Kabupaten Kupang
5. Untuk mengetahui signifikansi pengaruh teknologi informasi terhadap inventarisasi aset Pemerintah Kabupaten Kupang
6. Untuk mengetahui signifikansi pengaruh komitmen pimpinan terhadap inventarisasi aset Pemerintah Kabupaten Kupang
7. Untuk mengetahui apakah inventarisasi aset mampu memediasi pengaruh teknologi informasi dan komitmen pimpinan terhadap pengelolaan aset tetap Pemerintah Kabupaten Kupang

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini terdiri dari 2 (dua) yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan teoritis terhadap ilmu pengetahuan dan menambah wawasan khususnya yang berkenaan dengan pengelolaan aset tetap, inventarisasi aset, teknologi informasi dan komitmen pimpinan.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti, sebagai peningkatan pengetahuan dan pemahaman tentang pengelolaan aset tetap.
- b. Bagi kepentingan kedinasan atau organisasi sektor publik, sebagai sumbangan pemikiran yang positif terhadap Pemerintah Kabupaten Kupang khususnya berkaitan dengan pengelolaan aset tetap, inventarisasi aset, teknologi informasi dan komitmen pimpinan.
- c. Bagi para akademisi khususnya penelitian selanjutnya, penelitian ini diharapkan memberikan masukan dan informasi yang berguna bagi peneliti yang ingin mengkaji dan meneliti mengenai pengelolaan aset tetap.